Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman

Sukamarriko Andrikasmi¹, Rani Sri Wahyuni²

Universitas Riau

E-mail: sukamarriko@lecturer.unri.ac.id¹, raniswhy@gmail.com²

Article History:

Received: 14 September 2022

Revised: 30 September 2022

Accepted: 30 September 2022

Keywords: Pelecehan
Seksual, Penyuluhan Hukum,
Artikel

Abstract: Kasus kekerasan dan pelecehan seksual semakin meningkat dan meresahkan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak ada payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai sanksi dari tindakan pelecehan seksual. Selain itu korban pelecehan seksual umumnya dialami oleh perempuan dan anak-anak walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki dapat menjadi korban pelecehan seksual. Artikel ini akan membahas mengenai tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual dengan harapan meningkatnya kesadaran hukum tentang tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia mengakui persamaan hak seluruh warga negaranya tanpa membeda-bedakan suku, agama, kepercayaan, pandangan politik, serta jenis kelamin. Pengakuan negara atas hak asasi manusia dilegitimasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini juga menjadi dasar terciptanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tidak bersifat diskriminatif terhadap seluruh warga negaranya semakin terlihat ketika terbentuk Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas HAM) pada tahun 1998 yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta penegakan atas hak-hak asasi manusia bagi perempuan di Indonesia.

Konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat sejak zaman dahulu selalu menempatkan perempuan sebagai pihak yang berada pada tangga sosial paling rendah. Selain itu budaya patriarki yang kental yang masih menjadi tradisi di beberapa daerah di Indonesia juga menyebabkan perempuan sebagai pihak yang seolah-olah tidak berdaya dan tidak memiliki hak untuk membela dirinya sendiri ketika mengalami kekerasan baik secara fisik maupun nonfisik.

Fenomena ini tak lepas dari budaya patriarki yang masih melekat khususnya pada masyarakat di daerah pedesaan. Budaya patriarki yang masih melekat kemudian menimbulkan angka kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang relatif tinggi. Berdasarkan data yang dilansir melalui Komnas Perempuan pada tahun 2021 terjadi lonjakan kasus pengaduan

Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) yang umumnya dialami oleh perempuan sebanyak 299.911 kasus¹. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang menargetkan perempuan sebagai korban yang paling rentan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yaitu bahwa tidak ada satupun yang berhak mengalami kekerasan, maka sudah sepatutnya kesadaran akan kekerasan seksual harus digalakkan.

Sayangnya kesadaran akan pentingnya penghormatan atas hak asasi terhadap seluruh manusia belum terlaksana dengan baik. Pada masyarakat yang berada di desa atau jauh dari kota, budaya patriarki yang menempatkan perempuan berada pada struktur sosial terendah menyebabkan terjadi banyaknya pelanggaran hak asasi berupa kekerasan dan pelecehan seksual yang umumnya terjadi pada perempuan.

Untuk itu diperlukan adanya penyuluhan atau sosialisasi secara kontinu sebagai suatu langkah preventif untuk mencegah dan menekan angka kekerasan dan pelecehan seksual dalam masyarakat.

METODE

Pelaksanaan penyuluhan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertempat di aula Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang berasal dari kalangan pelajar, warga desa, serta anggota PKK Desa Pasar Inuman.

Metode kegiatan berupa penyuluhan dan diskusi dengan peserta dengan harapan terciptanya peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya patriarki masih sangat melekat dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat tradisional di pedesaan yang belum terpapar oleh teknologi dan modernitas secara menyeluruh. Menurut Rokhmansyah (dalam Sakina, 2017:72) patriarki berasal dari kata *patriat* yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Budaya patriarki mempersempit ruang gerak perempuan sebagai seorang manusia yang pada hakikatnya merupakan suatu entitas yang memiliki akal pikiran serta memiliki kontrol atas dirinya sendiri. sistem konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan secara kualitas berada di bawah laki-laki, menyebabkan perempuan rentan mengalami diskriminasi baik secara verbal, fisik, perlakuan sosial, bahkan perlindungan hukum.

Lebih lanjut dikatakan oleh Paradias dan Supono (62:2022), kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa tindakan yang sudah mengarah pada *action* nyata yang mengakibatkan kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Kekerasan yang dialami oleh perempuan pada kenyataannya menimbulkan dampak buruk yang cukup signifikan baik secara fisik maupun mental serta mampu memicu trauma yang mendalam bagi korban. Trauma yang timbul pada efek jangka panjang menjadikan korban terganggu fungsinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut dikatakan oleh Noviani (2018:49) kekerasan yang terjadi pada seorang

perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tatanan nilai yang seperti ini melahirkan konstruksi sosial di mana perempuan menjadi kaum yang terpinggirkan dan termarginalisasi, kehilangan hak-haknya sebagai manusia yang setara di hadapan hukum, kehilangan hak atas status sosial, bahkan kehilangan hak pribadinya sebagai manusia yang memiliki akal untuk membela dirinya sendiri. stigma seperti ini juga menjadi salah satu faktor pemicu maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, juga menjadi faktor penyebab tidak melaporkannya perempuan sebagai korban atas tindakan kekerasan yang diterimanya.

Pemahaman mengenai kekerasan seksual belum dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh sehingga banyak korban kekerasan seksual yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya ia telah menjadi korban. Masyarakat awam, khususnya masyarakat di daerah pedesaan, masih menganggap bahwa kekerasan yang dialami ialah aib diri dan keluarga yang seharusnya ditutupi. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa :

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, tetapi juga mencakup kekerasan nonfisik berupa kekerasan berupa pelecehan secara verbal. Pelecehan verbal merupakan suatu perbuatan yang melakukan suatu perbuatan seperti melontarkan kata yang bersifat pronoseksual maupun perilaku genit, gatal, atau centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman (Kartika dan Najemi, 2020:2). Kekerasan verbal seringkali hanya dianggap sebatas lelucon yang tidak perlu ditanggapi secara serius. Namun pada kenyataannya kekerasan verbal acap kali menimbulkan perasaan tidak nyaman yang berakibat pada perasaan malu, stress, bahkan depresi.

Pelaku kekerasan dan pelecehan seksual umumnya adalah laki-laki dengan korban mayoritas perempuan. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki menjadi korban kekerasan seksual. Data terbaru yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2022 menunjukkan bahwa total korban kekerasan seksual pada tahun 2022 sebanyak 14.248 kasus dengan rincian sebanyak 13.155 atau 79.5% korban perempuan dan 2.202 atau 20.6% korban laki-laki. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual dibanding laki-laki, namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa menjadi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga merilis data yang cukup mengejutkan bahwa dari seluruh total 14.248 kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tahun 2022, sebanyak 10.3% dari pelaku adalah perempuan.

Penyuluhan hukum yang diberikan terlaksana pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 09.00-11.00 WIB bertempat di aula kantor camat Inuman. Penyuluhan dihadiri oleh perangkat desa dan

kecamatan seperti Kepala Desa Pasar Inuman, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Pasar Inuman, Kepala Subsektor Polsek Inuman, serta Sekretaris Camat Inuman. Peserta yang hadir dalam penyuluhan ini ialah pelajar SMA/MA, warga desa, serta anggota PKK Desa Pasar Inuman.

Penyuluhan hukum yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini memfokuskan pembahasan mengenai cara mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri. Selain itu penyuluhan hukum ini juga membahas mengenai apa yang harus dilakukan ketika mengalami kekerasan seksual serta bagaimana alur prosedur pelaporan dan penyelesaiannya.

Peserta yang mayoritas dihadiri oleh perempuan dan ibu rumah tangga ini sangat antusias mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Terbukti dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan saat diskusi berlangsung. Isu yang menjadi topik hangat dalam diskusi ialah bagaimana cara meyakinkan korban untuk melaporkan ke pihak berwajib bahwa ia telah menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual, sebab stigma yang berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat desa, adalah bahwa kasus pelecehan seksual merupakan aib keluarga yang seharusnya ditutupi.

Secara umum *output* dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual serta meningkatnya kesadaran bahwa Negara pada dasarnya melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan perempuan, dapat lebih awas ketika berada di ruang publik dan memahami bahwa menjadi korban pelecehan seksual bukanlah merupakan suatu aib dan harus segera dilaporkan ke pihak berwajib.

KESIMPULAN

Kasus pelecehan seksual semakin hari semakin melonjak. Tidak hanya perempuan, namun laki-laki juga dapat menjadi korban. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan menyebabkan perlunya suatu aksi nyata untuk mencegah lonjakan kasus pelecehan seksual. Penyuluhan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Desa Pasar Inuman diharapkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tentang bahayanya tindakan kekerasan dan pelecehan seksual serta menjadi suatu langkah untuk meyakinkan masyarakat agar segera melapor apabila menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual harus terus digalakkan dan dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu diperlukan adanya suatu lembaga pengawas wasi segala bentuk tindakan kekerasan dan pelecehan seksual dan yang menaungi korban di tingkat desa agar korban tidak kebingungan untuk melaporkan ketidakadilan yang dialaminya.

DAFTAR REFERENSI

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran RI Nomor 6792. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kartika dan Andi Najemi. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS : Journal of Criminal*, 1 (2), hal 2.

- Komnas Perempuan. 2021. Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*.
- Noviani P, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Humaedi. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian & PPM*, 5 (1), hal 49
- Paradias Rosania, Soponyono Eko. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (1), hal 62
- Sakina, Dessy Hasanah. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Network Jurnal*, 7 (1), hal 72.
- Simfoni-PPA. Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan. [Kemenpppa.go.id](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses 14 Agustus 2022).